



Anggaran Dipangkas,...

"Kami masih menunggu. Nanti kami menyesuaikan anggaran yang ada. Kan kami juga harus menyesuaikan kemampuan APBD juga," katanya.

Aris mengungkapkan saat Pilkada Bantul 2024, pihaknya memiliki sekitar 20 program prioritas yang harus diselesaikan selama kepemimpinannya bersama Bupati Halim. Dari program prioritas tersebut ada program yang sangat penting dijalankan, di antaranya adalah pembangunan 600 kilometer jalan desa tuntas dalam 5 tahun, pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan dan penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum. "Ini semua akan kami sesuaikan dengan anggaran yang ada," ungkapnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan selain pembangunan jalan desa dan penanganan sampah, ia akan fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul bersama dengan para lurah di wilayahnya. "Pokoknya uang [daerah] itu harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia," jelasnya.

Halim mengaku belum bisa menjawab berapa besaran *refocusing* yang akan dijalankan.

"Ini sedang kami hitung ulang. Yang jelas ATK [Alat Tulis Kantor] akan kami babat dan hanya menyisakan 10-25

persen. Begitu juga perjalanan dinas," ucap Halim.

Kepala BKAD Kabupaten Bantul, Trisna Manurung, mengungkapkan besaran dana transfer dari pusat baik berupa DAK, DAU dan dana bagi hasil serta perimbangan dipastikan berkurang. DAK dan DAU infrastruktur untuk Bantul pada 2025 dipangkas Rp21 miliar.

Geser Pos

Wali Kota Jogja terpilih Hasto Wardoyo mengatakan penanganan persoalan sampah menjadi program kerja yang akan diselaraskan dengan eksisting program Pemkot Jogja. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas bagi Hasto. "Terkait dengan itu, masalah pendidikan, pengentasan pengangguran itu menjadi penting karena memang betul-betul kita di Kota Jogja hanya punya SDM, sementara sumber daya alamnya terbatas," katanya.

Mantan Kepala BKKBN ini menyebut pihaknya telah menyiapkan tim transisi. Nantinya akan ada pertemuan dengan Pemkot Jogja sebelum pelantikan digelar.

Tim transisi akan menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Pemkot Jogja. Sekaligus mendengarkan eksisting program di Kota Jogja.

"Jadi saya kira itu sudah kita diskusikan karena kalau kita membuat konsep di tim transisi kan harus mendengar eksisting programnya," ungkap Hasto.

Sekretaris Daerah Kabupaten

Sleman, Susmiarto, mengatakan akan menggeser pos-pos anggaran guna mendukung program prioritas kepala daerah terpilih.

Susmiarto mengatakan skema alokasi anggaran guna mendukung program prioritas Kepala Daerah mirip dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau memang ada prioritas Bupati terpilih, anggaran yang sudah dialokasikan bisa digeser," kata Susmiarto.

Apabila melihat RPJMD Sleman 2021-2026, paling tidak ada alokasi khusus untuk sektor pendidikan minimal 20% dan kesehatan minimal 10%.

Alokasi di sektor pendidikan diberikan untuk beasiswa pendidikan, gaji, hingga perbaikan gedung sekolah. Adapun sektor kesehatan ada jaminan sosial kesehatan BPJS, puskesmas, posyandu, hingga operasional RSUD. Ihtwal alokasi anggaran untuk MBG saat ini masih berada di pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan belum dilakukan lantaran belum ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. "Tapi kemudian Pusat mengatakan Daerah tidak perlu menyediakan," katanya.

Target awal alokasi MBG di Kabupaten Sleman sebesar Rp115 miliar. Alokasi tersebut kemudian turun menjadi Rp76 miliar yang kemudian masuk di biaya tak terduga (BTT).

"Kami bisa menggeser alokasi anggaran MBG yang berada di pos BTT tadi, karena tidak digunakan," katanya. (Andreas

Yuda Pramono)